

## Pendidikan Islam dalam Konteks Makro dan Mikro: Implementasi Konsep dan Praktik di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan

Nazifah Husainah<sup>1</sup>, Neni Handayani<sup>2</sup>, Suharta<sup>3</sup>, Najmi Ulya<sup>4</sup>, Raspa Laa<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana,  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

nazifah.husainah@umj.ac.id<sup>1</sup>, 24110100011@student.umj.ac.id<sup>2</sup>,  
24110100016@student.umj.ac.id<sup>3</sup>, 24110100032@student.umj.ac.id<sup>4</sup>,  
24110100037@student.umj.ac.id<sup>5</sup>

### ABSTRACT

*Islamic education plays a strategic role in shaping students' character, spiritual depth, and social competence. At the macro level, it is integrated into national policy frameworks, the formal education system, and broader challenges posed by globalization and modernization. At the micro level, Islamic education is realized through everyday practices within educational institutions, notably in pesantren. This study explores the implementation of Islamic education in the micro context of Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, South Jakarta, focusing on classroom learning, social interaction, and students' daily life activities. Employing a qualitative approach with an exploratory case study design, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The study identifies five key themes: the alignment between national and local visions, the presence of transformational leadership, active community involvement, managerial innovation, and limitations in human resource capacity. The findings also highlight major challenges such as imbalanced curricula and organizational resistance to change. Nevertheless, the pesantren adopts effective strategies including continuous professional development, contextual curriculum development, and alumni engagement to strengthen institutional resilience. The study underscores the significance of integrating macro policy with micro-level implementation to build an adaptive, sustainable, and contextually relevant model of Islamic education that addresses both national goals and local realities.*

**Keywords:** *Islamic Education, Pesantren, Macro and Micro - Level Practice, Policy Implementation, Pondok Pesantren Darunnajah*

### ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan kecakapan sosial peserta didik. Dalam tataran makro, pendidikan Islam terhubung erat dengan kebijakan nasional, sistem pendidikan formal, serta dinamika globalisasi. Sementara dalam konteks mikro, pendidikan Islam diwujudkan melalui praktik nyata di lingkungan lembaga, salah satunya pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep pendidikan Islam dalam konteks mikro di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan, dengan menyoroti aspek pembelajaran, interaksi sosial, dan kehidupan keseharian santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan lima aspek kunci dalam

pelaksanaan pendidikan di pesantren: keselarasan visi antara kebijakan nasional dan nilai lokal, kepemimpinan transformasional, keterlibatan komunitas, inovasi manajerial, serta tantangan sumber daya manusia. Temuan juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala seperti ketimpangan kurikulum dan resistensi budaya organisasi terhadap perubahan, strategi seperti pelatihan berkelanjutan, kurikulum kontekstual, dan pelibatan alumni mampu menjadi solusi konstruktif. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan makro dan praktik mikro dalam penguatan pendidikan Islam yang adaptif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Pesantren, Konteks Makro dan Mikro, Implementasi Kebijakan, Pondok Pesantren Darunnajah.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan sistem yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, spiritualitas, dan kecerdasan umat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan negara serta perubahan sosial masyarakat. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, manajemen pendidikan Islam beroperasi dalam dua ranah utama yaitu makro dan mikro. Pada tingkat makro, negara berperan melalui kebijakan, regulasi, dan arah pembangunan yang strategis, sementara pada tingkat mikro, satuan pendidikan seperti madrasah dan pesantren menjadi pelaksana langsung kebijakan tersebut dalam konteks lokal yang sangat beragam (Azra, 2012).

Relasi antara kebijakan makro dan implementasi mikro sering kali tidak berjalan selaras. Ketidaksiharian antara perumusan kebijakan dengan realitas di lapangan dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak optimal. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang mampu mengelola sinergi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan dan pencapaian tujuan pendidikan Islam (Ma'arif, 2014). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses integrasi manajemen pendidikan Islam dilakukan antara tingkat makro dan mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis integrasi manajemen pendidikan Islam dari dua perspektif tersebut. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dan diimplementasikan di satuan pendidikan, khususnya Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan sebagai studi kasus. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem manajemen pendidikan Islam yang lebih sinergis, kontekstual, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pendidikan

Islam di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Jakarta Selatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna sosial, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pendidikan Islam dijalankan dalam konteks mikro, mencakup aktivitas pembelajaran, interaksi sosial, serta kehidupan sehari-hari santri yang berinteraksi secara langsung dengan nilai-nilai Islam dalam lingkungan yang tertutup dan terstruktur seperti pesantren.

Dalam konteks desain studi kasus, peneliti berupaya membedah unit analisis secara utuh dan menyeluruh. Pondok Pesantren Darunnajah dipilih sebagai lokasi penelitian karena mewakili model pesantren modern yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memadukan unsur pendidikan umum dan keterampilan hidup secara terintegrasi. Lembaga ini memiliki fasilitas pendidikan formal, program ekstrakurikuler, sistem asrama, serta unit-unit usaha mandiri yang dikelola oleh santri. Kompleksitas ini memberikan ruang kajian yang kaya untuk melihat bagaimana konsep pendidikan Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan mikro di dalam pesantren.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada berbagai informan kunci, termasuk pimpinan pesantren, para ustadz, santri senior, serta staf administrasi. Pertanyaan-pertanyaan disusun untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik pendidikan dalam keseharian mereka. Observasi dilakukan dengan mengikuti aktivitas keseharian pesantren, mulai dari kegiatan pembelajaran, ibadah, aktivitas di asrama, hingga kegiatan usaha santri. Observasi ini dilakukan secara partisipatif untuk memahami suasana sosial dan nilai-nilai yang menginternalisasi dalam interaksi harian.

Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk memperkuat temuan lapangan. Dokumen-dokumen yang dianalisis antara lain kurikulum pesantren, peraturan santri, dokumen visi-misi lembaga, program kerja tahunan, serta arsip kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pembinaan karakter. Data dari dokumentasi ini digunakan untuk mengecek konsistensi antara kebijakan lembaga dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Proses dokumentasi juga penting untuk melihat bagaimana lembaga pesantren mengadopsi atau menyesuaikan kebijakan makro (nasional) ke dalam struktur dan budaya institusional mereka.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan analisis tematik, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi makna, dan penyusunan narasi tematik. Data hasil wawancara dan observasi direkam, di transkrip, lalu dikode secara terbuka untuk menemukan pola-pola yang berulang dan bermakna. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang mencerminkan realitas pendidikan Islam dalam konteks mikro di pesantren. Seluruh proses ini dijalankan secara iteratif, artinya peneliti terus-menerus menyesuaikan antara temuan lapangan dengan kerangka konseptual yang digunakan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar data yang diperoleh saling menguatkan dan tidak bersifat subjektif. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking*, yakni mengonfirmasi kembali informasi yang diperoleh kepada responden terkait, guna memastikan bahwa interpretasi data tidak menyimpang dari maksud dan pemahaman mereka. Proses reflektif antar peneliti juga dilakukan untuk menjaga objektivitas dan konsistensi dalam penafsiran data, sekaligus menghindari bias pribadi.

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap realitas pendidikan Islam dalam bentuk yang utuh dan hidup. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi turut merasakan dan memahami suasana, nilai, serta dinamika sosial yang membentuk proses pendidikan di pesantren. Harapannya, hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan autentik tentang bagaimana konsep-konsep besar dalam pendidikan Islam benar-benar dijalankan di lapangan, khususnya dalam konteks mikro di lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan kunci yang memperkuat pentingnya integrasi antara kebijakan makro dan praktik mikro dalam manajemen pendidikan Islam. Lima tema utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan Visi antara Pusat dan Lokal

Lembaga pendidikan Islam yang memiliki mekanisme internal untuk menyelaraskan visi nasional dengan kebutuhan dan karakteristik lokal menunjukkan tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi. Keselarasan ini tercermin dalam dokumen perencanaan strategis, forum musyawarah internal, serta keterlibatan kepala satuan pendidikan dalam forum komunikasi kebijakan. Institusi semacam ini cenderung lebih inovatif karena mampu mentransformasi arah kebijakan menjadi strategi yang aplikatif dan kontekstual.

2. Kepemimpinan Transformasional

Peran kepemimpinan sangat menentukan dalam menerjemahkan kebijakan makro ke dalam tindakan nyata di lapangan. Kepala lembaga yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan karakteristik visioner, inspiratif, dan responsif terhadap perubahan menjadi penggerak utama perubahan positif dalam organisasi. Mereka tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu memotivasi dan melibatkan seluruh elemen institusi.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya

Hampir semua responden menyoroti keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam memahami arah kebijakan nasional sebagai hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Hal ini berdampak pada lambatnya inovasi, keterbatasan pelatihan, serta rendahnya kualitas pelaporan dan evaluasi.

### 4. Peran Komunitas Lokal

Keterlibatan masyarakat, baik melalui komite sekolah, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat, terbukti memperkuat keberterimaan kebijakan mikro. Partisipasi ini juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

### 5. Inovasi Manajerial

Beberapa lembaga menunjukkan inovasi dalam hal sistem evaluasi berbasis digital, pelaporan progres pembelajaran yang lebih transparan, serta kurikulum berbasis lokal yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Inovasi ini menjadi indikator kapasitas institusi dalam menghadapi dinamika zaman secara kreatif.

## **Integrasi Kebijakan Makro dan Implementasi Mikro dalam Manajemen Pendidikan Islam**

Efektivitas manajemen pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya untuk menjembatani kebijakan tingkat makro yang dirumuskan oleh otoritas pusat dengan implementasi di tingkat mikro, yaitu di satuan-satuan pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah Islam terpadu. Dalam konteks ini, institusi pendidikan Islam berada di garis depan dalam mengonversi visi strategis nasional menjadi program, aktivitas, dan hasil nyata di lapangan. Artinya, keberhasilan reformasi pendidikan Islam sangat bergantung pada seberapa efektif institusi mampu memediasi antara kebijakan dan realitas lokal.

Kebijakan nasional seperti penguatan moderasi beragama, digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan implementasi kurikulum merdeka, merupakan contoh inisiatif makro yang membutuhkan pemahaman kontekstual dan pelaksanaan strategis oleh lembaga di tingkat akar rumput. Di sini, konsep *decoding policy* menjadi penting di mana institusi tidak sekadar menerima kebijakan secara *top-down*, tetapi juga menyesuaikannya dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis setempat.

Manajemen pendidikan Islam adalah seluruh proses kegiatan bersama dalam lembaga pendidikan Islam dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada, yang dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif (*do the right things* - melakukan pekerjaan yang benar), efisien (*do things right* - melakukan pekerjaan dengan benar), dan produktif. Sumber daya dalam konteks

manajemen pendidikan Islam adalah berupa *man* (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan), *money* (biaya/pendanaan), *materials* (bahan: kurikulum, informasi), *methods* (metode, teknik, strategi), *machines* (sarana dan prasarana), *market* (lulusan, pengguna lulusan/*user*), dan *minutes* (waktu). (Machali, 2015)

## 1. Peran Kepemimpinan dalam Menjembatani Kebijakan

Pemimpin institusi pendidikan Islam, baik kepala madrasah, pimpinan pesantren, maupun pengelola sekolah Islam lainnya, memainkan peran sentral dalam menjembatani kebijakan makro ke dalam praktik mikro. Kepemimpinan yang visioner dan transformasional mampu menginternalisasi nilai-nilai kebijakan nasional ke dalam budaya organisasi dan menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan harian.

Kepemimpinan seperti ini tidak hanya menjadi penyambung lidah pemerintah, tetapi juga penerjemah kebijakan ke dalam bentuk kegiatan yang aplikatif dan diterima oleh komunitas lokal. Dalam banyak kasus, pemimpin yang tidak memahami konteks kebijakan nasional atau tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada stafnya akan mengalami kesulitan dalam menyelaraskan visi pusat dengan kebutuhan lapangan.

Dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang kini dituntut untuk adaptif terhadap berbagai kebijakan pendidikan nasional, kepemimpinan memiliki peran kunci dalam menjembatani kebijakan makro (negara) dan implementasi mikro (pesantren).

Kepemimpinan pesantren bukan hanya bertugas mengatur kegiatan harian atau menjalankan administrasi, tetapi juga berperan sebagai mediator kebijakan menginterpretasikan, menyesuaikan, dan mengimplementasikan regulasi nasional ke dalam kultur dan sistem pendidikan khas pesantren. Figur kiai atau pimpinan pondok kerap kali memiliki otoritas karismatik yang tinggi dan menjadi tokoh sentral dalam menyelaraskan nilai-nilai kebijakan pemerintah dengan visi-misi lembaga.

Misalnya, ketika pemerintah mewajibkan penerapan Kurikulum Merdeka atau moderasi beragama, tidak semua satuan pendidikan Islam langsung menerima atau mampu mengimplementasikannya. Di sinilah letak pentingnya kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi perubahan, membangun komunikasi antar pihak, dan menerjemahkan kebijakan eksternal ke dalam bentuk operasional yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan santri.

Pesantren Darunnajah Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam modern yang memiliki sistem manajemen terstruktur dan dikenal sebagai model pesantren yang berhasil mengintegrasikan pendidikan diniyah (keislaman) dengan pendidikan formal nasional. Dalam menghadapi dinamika kebijakan pendidikan nasional seperti implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan moderasi beragama, dan digitalisasi pendidikan kepemimpinan di Pesantren Darunnajah memainkan peran strategis dalam menjembatani kebijakan tersebut ke dalam konteks khas pesantren.

Kepemimpinan Darunnajah, yang bersifat kolektif dan hierarkis dengan Kiai sebagai figur sentral spiritual dan manajer pendidikan formal (kepala sekolah, direktur unit) sebagai pelaksana teknis mampu membangun harmoni antara nilai-nilai tradisional Islam dan kebijakan nasional kontemporer (Basit, 2019). Hal ini tercermin dalam beberapa aspek: Pondok Pesantren Darunnajah menerjemahkan nilai kebijakan nasional seperti gotong royong dan profil pelajar Pancasila ke dalam visi pesantren yang sarat nilai ukhuwah, ijtihad, dan khidmah. Setiap kebijakan baru dikaji melalui musyawarah pimpinan dan majelis guru agar implementasinya tetap sejalan dengan ruh pesantren. Sinergi antar unit pendidikan diperkuat dengan arahan dari kepemimpinan pusat, memastikan strategi pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan karakter dan jenjang peserta didik. Kiai sebagai pemimpin transformasional memberi keteladanan dalam menerima perubahan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital secara bijak untuk mendukung pembelajaran modern.

Kehadiran seorang Kyai dalam pesantren merupakan sebuah keniscayaan, karena Kyai sebagai tokoh sentral atau *Top leader* dalam mengambil keputusan. Misalnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar (akademik), penyelenggaraan pengelolaan administrasi (manajemen) atau yang berhubungan dengan kepemimpinan kelembagaan (struktur 22 organisasi). bahkan sampai pada estafet kepemimpinan ( regenerasi) dan hal lain yang berhubungan dengan dunia pesantren (Basit, 2019).

## 2. Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan

Salah satu aspek penting dalam menjembatani kebijakan makro dan mikro adalah proses komunikasi dan sosialisasi. Banyak institusi pendidikan Islam mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan karena lemahnya komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya media komunikasi yang efektif, waktu yang terbatas dalam sosialisasi, atau ketidaksesuaian bahasa kebijakan yang terlalu teknokratis dan tidak kontekstual.

Proses sosialisasi yang bersifat partisipatif dan komunikatif menjadi kebutuhan mendesak. Guru, staf administrasi, bahkan wali murid harus memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses implementasinya. Dalam banyak kasus, kebijakan nasional yang baik justru gagal diimplementasikan karena minimnya pemahaman dan keterlibatan para pelaksana di tingkat bawah (A. Anderson, 2006).

## 3. Kesiapan Sumber Daya dan Infrastruktur

Pesantren Darunnajah memiliki struktur organisasi pendidikan yang profesional, terdiri dari kiai, mudir, kepala sekolah/madrasah, para guru, serta tenaga kependidikan. Mayoritas pengajar memiliki latar belakang akademik sarjana dan pascasarjana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (khususnya Timur Tengah). Pesantren Darunnajah memiliki SDM yang profesional dan siap menghadapi

tantangan pendidikan modern dengan tetap menjaga karakter salafiyah. Struktur kepemimpinannya terdiri dari kiai, mudir, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang bekerja secara kolektif dan terorganisir. Mayoritas pendidik berpendidikan S1 hingga S3 dari dalam dan luar negeri, khususnya Timur Tengah, serta menguasai ilmu diniyah dan kurikulum nasional. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan rutin, sementara sistem *boarding* memperkuat kultur disiplin dan pembinaan santri. Kepemimpinan strategis kiai juga terlihat dalam penerapan kebijakan nasional secara adaptif dan kontekstual sesuai nilai pesantren.

Pesantren Darunnajah memiliki infrastruktur fisik dan digital yang mendukung pembelajaran holistik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan pendidikan nasional. Ruang kelasnya representatif dan dilengkapi perangkat modern. Laboratorium komputer, sains, dan bahasa, serta perpustakaan dengan koleksi kitab kuning dan buku umum tersedia untuk menunjang pembelajaran. Fasilitas asrama terkelola rapi dalam lingkungan terpadu yang mendukung pembinaan karakter santri secara menyeluruh, lengkap dengan masjid, lapangan, kantin, dan klinik kesehatan. Dari sisi digital, pesantren telah mengintegrasikan sistem pembelajaran dengan LMS, e-rapor, aplikasi presensi, dan SIMP internal untuk efisiensi manajemen pendidikan. Dalam hal pendanaan dan tata Kelola pesantren ini memiliki sistem keuangan dan tata kelola yang mandiri dan transparan, sehingga mampu mengembangkan sumber daya dan infrastruktur tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.

#### 4. Kontekstualisasi Kurikulum dan Pembelajaran

Implementasi kebijakan di bidang kurikulum sering kali menjadi tantangan besar bagi lembaga pendidikan Islam. Meski kurikulum nasional telah dirancang agar fleksibel, penerjemahannya di tingkat mikro masih sangat tergantung pada kapasitas institusi. Kurikulum Merdeka, misalnya, memberi ruang kreativitas bagi guru, tetapi tanpa dukungan pelatihan yang memadai, kebijakan ini justru membingungkan banyak pendidik di lapangan.

Institusi yang mampu mengaitkan kurikulum nasional dengan konteks lokal seperti budaya masyarakat, kearifan lokal, dan tantangan sosial sekitar lebih mampu menciptakan model pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan gagasan pendidikan kontekstual (*contextual teaching and learning*), yang menekankan pentingnya hubungan antara materi pembelajaran dan kehidupan nyata siswa.

Pesantren Darunnajah Jakarta adalah contoh pesantren modern yang berhasil melakukan kontekstualisasi kurikulum dan pembelajaran secara seimbang antara tuntutan kebijakan pendidikan nasional dan karakteristik pendidikan Islam berbasis pesantren. Kontekstualisasi dalam hal ini berarti proses adaptasi dan integrasi kurikulum sehingga relevan dengan kebutuhan peserta didik (santri), visi lembaga, dan regulasi negara.

Pesantren Darunnajah mengintegrasikan kurikulum nasional dan diniyah dalam sistem terpadu. Kurikulum nasional, termasuk Kurikulum Merdeka, diterapkan di jenjang formal, sementara kurikulum diniyah mencakup kitab kuning, tahfiz, bahasa Arab, fiqh, akidah, dan adab. Keduanya disusun dalam jadwal terkoordinasi agar saling melengkapi, seperti mengaitkan nilai profil pelajar Pancasila dengan ajaran akhlak dan tarbiah Islam. Pembelajaran di Pesantren Darunnajah dirancang secara kontekstual dan holistik. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata santri, termasuk nilai keislaman dan keterampilan hidup. Pendekatan holistik-integratif mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam kegiatan kelas maupun luar kelas seperti asrama, organisasi santri, khutbah, dan pramuka. Bahasa Arab dan Inggris digunakan aktif sebagai media pembelajaran dan komunikasi harian untuk membentuk karakter santri yang global.

Pesantren Darunnajah mengadaptasi Kurikulum Merdeka dengan pendekatan khas pesantren. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) diintegrasikan dalam kegiatan santri seperti organisasi, bakti sosial, dan pelatihan kepemimpinan. Guru dilatih menerapkan asesmen diagnostik serta pembelajaran diferensiasi. Literasi dan numerasi dikembangkan berbasis nilai Islam, melalui buku dan media pembelajaran yang sesuai budaya dan akhlak pesantren. Karena berstatus swasta dan berada di bawah yayasan independen, Darunnajah memiliki otonomi untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum sesuai karakteristik dan visi lembaga. Hal ini memberi ruang untuk inovasi dan penguatan identitas keislaman dalam seluruh dimensi pembelajaran, tanpa mengabaikan tuntutan akreditasi dan standar nasional pendidikan.

## 5. Partisipasi Komunitas sebagai Jembatan Sosial

Selain struktur internal, keberhasilan integrasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh keterlibatan komunitas lokal. Lembaga pendidikan Islam yang menjalin kemitraan erat dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan orang tua peserta didik, cenderung lebih sukses dalam mengimplementasikan kebijakan karena mendapatkan dukungan moral, finansial, bahkan sumber daya manusia.

Partisipasi masyarakat dapat memperkuat legitimasi institusi serta menjadikan kebijakan pendidikan tidak terkesan sebagai intervensi negara semata, melainkan sebagai kebutuhan bersama. Pendekatan kolaboratif ini menciptakan suasana sinergi antara aktor makro dan mikro dalam dunia pendidikan.

Program pemberdayaan masyarakat oleh pesantren dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba dapat membantu pesantren dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Pesantren juga dapat menjalin kemitraan dengan *provider* telekomunikasi untuk penyesuaian akses internet yang terjangkau dan berkualitas. Kolaborasi antara pesantren dan industri dapat membuka peluang kerja dan pengembangan bisnis bagi santri. Pesantren dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi, lembaga

keuangan, dan sektor industri lainnya untuk mengadakan program magang, pelatihan keterampilan, dan inkubasi bisnis (Abror et al., 2024)

## 6. Evaluasi dan Umpan Balik Berkelanjutan

Untuk memastikan bahwa integrasi kebijakan berjalan efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga reflektif. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan kondisi riil dan memberi ruang pada pelaksana kebijakan untuk memberikan umpan balik.

Lembaga pendidikan yang secara rutin melakukan refleksi kebijakan melalui forum guru, musyawarah kepala sekolah, atau survei siswa dan orang tua, akan lebih cepat mengetahui kelemahan implementasi dan melakukan perbaikan. Proses ini juga mendorong budaya evaluatif yang berorientasi pada kualitas dan inovasi.

Pesantren Darunnajah Jakarta melaksanakan Rapat Manajemen Pesantren untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan program kerja, dan memperkuat sinergi antar departemen guna memastikan kualitas pendidikan dan pengelolaan pesantren yang optimal. Rapat Manajemen Pesantren merupakan forum penting untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan langkah ke depan.

### **Tantangan Implementasi Pendidikan Islam dalam Konteks Mikro**

Meskipun Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami menunjukkan berbagai capaian dalam praktik pendidikan Islam, tantangan pada level implementasi tetap menjadi hal yang menonjol. Salah satu tantangan utama adalah kompetensi tenaga pendidik yang belum merata. Beberapa ustadz dan guru belum memiliki latar belakang pedagogik formal atau pelatihan metodologi pembelajaran mutakhir. Hal ini berpengaruh pada variasi kualitas pengajaran, terutama dalam menyampaikan materi yang membutuhkan pendekatan interaktif, kontekstual, dan kolaboratif. Tantangan ini makin terasa ketika pesantren ingin mendorong pembelajaran aktif atau integratif antara ilmu agama dan ilmu umum.

Selain aspek SDM, terdapat persoalan terkait keseimbangan kurikulum. Kurikulum pesantren mengandung muatan keagamaan yang cukup padat, sementara tuntutan terhadap penguasaan ilmu umum dan keterampilan abad 21 juga semakin tinggi. Ketidakseimbangan ini kadang membuat santri kewalahan dan kesulitan mengatur waktu antara hafalan, pelajaran formal, kegiatan organisasi, dan praktik keagamaan. Hal ini juga berdampak pada aspek psikososial santri, terutama dalam menjaga motivasi belajar dan kesehatan mental mereka.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah budaya organisasi yang cenderung konvensional dan resistensi terhadap perubahan. Beberapa elemen dalam lembaga masih memandang inovasi dengan curiga, terlebih jika menyangkut integrasi teknologi atau pembaruan sistem administrasi dan evaluasi. Sikap kehati-hatian ini sering kali didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya autentisitas nilai-nilai keislaman atau rusaknya tatanan tradisional. Padahal, perubahan yang berbasis

nilai tetap dapat dilakukan tanpa menanggalkan identitas pesantren. Jika tidak dikelola dengan baik, resistensi ini bisa menjadi penghambat utama dalam proses adaptasi kelembagaan terhadap perkembangan zaman.

## **Strategi Penguatan Pendidikan Islam di Pesantren**

Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, Pondok Pesantren Darunnajah telah menerapkan sejumlah strategi penguatan kelembagaan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Strategi pertama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Guru dan tenaga kependidikan diikutsertakan dalam pelatihan rutin yang mencakup keterampilan pedagogik, penggunaan teknologi pendidikan, serta penguatan etika profesi. Pelatihan ini dilakukan baik secara internal, melalui program kaderisasi dan *mentoring* oleh alumni senior, maupun eksternal bekerja sama dengan lembaga pelatihan guru dan kampus mitra. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem pembelajaran yang profesional, responsif, dan kontekstual.

Strategi kedua berfokus pada penguatan kurikulum kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan zaman. Kurikulum tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, keterampilan hidup, dan kesadaran sosial santri. Pesantren mulai menata ulang struktur kurikulum agar lebih proporsional antara pelajaran diniyah dan umum, serta menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi aktual santri. Selain itu, muatan lokal seperti kewirausahaan dan teknologi informasi juga mulai dimasukkan untuk mempersiapkan santri menghadapi dunia luar secara kompeten.

Strategi selanjutnya adalah peningkatan kapasitas institusi melalui penguatan manajemen dan infrastruktur. Pimpinan pesantren mulai memperkenalkan sistem manajerial berbasis data dan evaluasi berkala guna meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Di sisi lain, penguatan infrastruktur dilakukan secara bertahap, baik melalui dana internal maupun dukungan dari alumni dan masyarakat. Kolaborasi eksternal dengan lembaga pendidikan tinggi, LSM keagamaan, dan pemerintah setempat juga diupayakan untuk membuka akses bantuan teknis dan sumber daya.

Terakhir, pesantren mengedepankan partisipasi komunitas, khususnya alumni dan orang tua santri, sebagai bagian penting dari tata kelola pendidikan. Alumni tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan, pengajaran, hingga pengembangan unit usaha pesantren. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dibangun di atas kerja kolektif yang terstruktur dan berkelanjutan. Kombinasi antara strategi internal dan kolaborasi eksternal inilah yang menjadi fondasi penguatan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang tangguh, adaptif, dan relevan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam dalam konteks mikro di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami merupakan cerminan dari upaya nyata mengintegrasikan kebijakan makro nasional dengan praktik pendidikan berbasis nilai lokal. Pesantren ini tidak hanya berperan sebagai lembaga transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai agen pembentuk karakter dan pusat pemberdayaan sosial. Melalui perencanaan strategis, pesantren berhasil menyelaraskan visi kelembagaan dengan arah kebijakan pendidikan Islam nasional yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 18 Tahun 2019.

Temuan penelitian mengungkap lima dimensi penting yang saling terkait dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren ini, yakni: keselarasan visi antara kebijakan makro dan nilai lokal, kepemimpinan yang bersifat transformasional, keterlibatan komunitas lokal yang aktif, inovasi manajerial dalam adaptasi lembaga, serta tantangan keterbatasan sumber daya manusia yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kelima elemen tersebut menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan praktik pendidikan Islam di level institusi akar rumput.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam implementasi, seperti ketidakseimbangan antara kurikulum umum dan diniyah, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, serta resistensi budaya organisasi terhadap pembaruan. Tantangan-tantangan tersebut bersifat struktural maupun kultural, dan jika tidak ditangani secara strategis, berpotensi menghambat proses transformasi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang adaptif dan unggul.

Pesantren telah merespons tantangan tersebut dengan mengembangkan berbagai strategi penguatan, di antaranya melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru, penataan ulang kurikulum agar lebih kontekstual dan proporsional, peningkatan kapasitas manajerial kelembagaan, serta pelibatan alumni dan masyarakat dalam tata kelola pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan pendidikan Islam terletak pada kemampuan institusi untuk bertransformasi secara berkelanjutan, tanpa kehilangan identitas spiritual dan sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat implementasi pendidikan Islam dalam konteks mikro di lingkungan pondok pesantren, khususnya di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami:

### 1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik secara Terstruktur

Salah satu langkah strategis yang sangat penting dilakukan adalah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, baik dari sisi akademik, pedagogik, maupun spiritual. Guru dan ustadz di pesantren perlu dibekali dengan pelatihan rutin yang sistematis, tidak hanya mengenai ilmu keagamaan, tetapi juga tentang pendekatan pembelajaran aktif, berbasis nilai, serta pemanfaatan teknologi.

Kurikulum pelatihan dapat mencakup metode pembelajaran kolaboratif, penyusunan media ajar digital, dan pengembangan strategi evaluasi yang relevan dengan kebutuhan santri. Program pelatihan ini bisa dijalankan melalui kerja sama dengan LPTK, lembaga pelatihan guru, maupun alumni pesantren yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan formal. Dengan tenaga pendidik yang profesional dan adaptif, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa menghilangkan kekhasan nilai-nilai pesantren.

## 2. Reformulasi Kurikulum yang Seimbang dan Kontekstual

Kurikulum di pesantren perlu disusun secara proporsional dan kontekstual, mengintegrasikan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan keterampilan hidup. Keseimbangan antara materi diniyah dan umum harus menjadi perhatian utama, agar santri tidak hanya unggul dalam hafalan dan ilmu agama, tetapi juga mampu memahami sains, teknologi, serta realitas sosial yang terus berubah. Reformulasi kurikulum juga harus mempertimbangkan karakteristik lokal, potensi santri, dan tantangan globalisasi. Kurikulum harus dirancang fleksibel namun berstandar, agar tetap relevan dalam jangka panjang. Pesantren dapat membentuk tim kurikulum internal yang melibatkan guru, alumni, dan pakar eksternal untuk memastikan bahwa isi kurikulum tidak ketinggalan zaman, dan proses belajarnya sesuai dengan prinsip Islam *rahmatan lil alamin*.

## 3. Digitalisasi Administrasi dan Sistem Pembelajaran

Pesantren perlu mulai merancang sistem digitalisasi baik dalam aspek administrasi kelembagaan maupun pembelajaran. Digitalisasi dapat dimulai dari yang sederhana, seperti pengarsipan nilai, kehadiran santri, hingga perencanaan kegiatan akademik dan non-akademik. Di sisi pembelajaran, penggunaan media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, hingga sistem manajemen pembelajaran berbasis daring (LMS) dapat menjadi pelengkap metode tradisional. Langkah ini tidak harus mengubah identitas pesantren secara mendasar, tetapi justru menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanpa meninggalkan nilai spiritual. Implementasi digitalisasi juga dapat memudahkan komunikasi dengan wali santri, pencatatan keuangan, dan pelaporan kinerja lembaga kepada pihak eksternal.

## 4. Penguatan dan Diversifikasi Unit Usaha Santri sebagai Wahana Kemandirian

Unit usaha seperti DFC (Darunnajah Fried Chicken) dan Deen Bakery merupakan inovasi manajerial yang dapat diperluas dan dijadikan sebagai laboratorium pembelajaran terapan bagi santri. Usaha ini tidak hanya memberikan pemasukan bagi pesantren, tetapi juga menjadi sarana pelatihan keterampilan hidup, tanggung jawab, dan kewirausahaan. Ke depan, unit usaha ini dapat dikembangkan melalui sistem pelatihan bisnis, pencatatan keuangan sederhana, dan keterlibatan santri dalam seluruh aspek produksi hingga

pemasaran. Pesantren dapat menyusun kurikulum pendamping yang mengaitkan materi kewirausahaan dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keberkahan rezeki, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, lulusan pesantren tidak hanya siap secara spiritual dan intelektual, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi dan kesadaran berwirausaha.

## 5. Perbaikan Infrastruktur Fisik dan Lingkungan Belajar

Kondisi fisik pesantren sangat menentukan kenyamanan dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan dan perawatan infrastruktur seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama, dan sarana ibadah harus menjadi prioritas. Fasilitas belajar yang memadai akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pendidikan. Selain itu, perhatian pada aspek kebersihan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan ketersediaan sarana sanitasi juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan santri. Dalam jangka panjang, pembangunan fasilitas ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan juga bisa menjadi bagian dari pendidikan nilai dan keberlanjutan. Upaya ini dapat didukung melalui sinergi antara pesantren, pemerintah, donatur, serta peran aktif alumni dan masyarakat lokal.

## 6. Pelibatan Komunitas dan Alumni dalam Pengembangan Pesantren

Komunitas dan alumni merupakan aset strategis bagi pengembangan pesantren. Oleh karena itu, pesantren perlu merancang mekanisme pelibatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, baik dalam hal ide, sumber daya, maupun kolaborasi program. Alumni dapat dilibatkan sebagai pengajar tamu, mentor, pembicara motivasi, hingga penanggung jawab kegiatan kewirausahaan dan pembinaan karier. Demikian pula masyarakat sekitar dapat diberdayakan dalam program keagamaan, kewirausahaan lokal, atau sebagai mitra dalam pelatihan keterampilan. Model pelibatan ini akan memperkuat rasa memiliki dan memperluas jejaring pendukung pesantren. Kegiatan seperti forum silaturahmi alumni, program pengabdian masyarakat, dan sinergi komunitas dapat dikembangkan untuk membangun ekosistem pendidikan Islam yang kokoh dan partisipatif.

## 7. Penguatan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Berbasis Data

Evaluasi terhadap program-program pesantren perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya secara administratif tetapi juga substantif. Pesantren dapat membentuk tim evaluasi internal yang bertugas mengembangkan instrumen pemantauan capaian belajar, efektivitas kurikulum, kinerja guru, dan kepuasan santri. Sistem evaluasi ini sebaiknya berbasis data kuantitatif maupun kualitatif agar mampu menggambarkan dinamika yang sesungguhnya. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan internal, pengambilan keputusan strategis, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Keterbukaan dalam evaluasi juga akan memperkuat akuntabilitas publik pesantren sebagai lembaga

pendidikan. Dalam jangka panjang, sistem *monitoring* berbasis data akan menjadi fondasi bagi pengembangan mutu secara berkelanjutan.

## 8. Revisi Visi dan Misi Pesantren agar Relevan dengan Perkembangan Zaman

Visi dan misi pesantren merupakan arah jangka panjang yang menjadi acuan seluruh aktivitas kelembagaan. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk merevisi atau menyegarkan visi-misi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi. Proses revisi ini sebaiknya melibatkan seluruh komponen pesantren, termasuk pimpinan, guru, santri, alumni, dan perwakilan masyarakat. Dengan visi yang jelas, inklusif, dan adaptif, seluruh unsur pesantren akan memiliki arah yang sama dalam menjalankan perannya. Revisi visi-misi juga menjadi momen refleksi untuk menilai apakah pesantren telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam serta mampu menjawab kebutuhan zaman secara realistis dan bijak.

## 9. Pengembangan Gaya Kepemimpinan yang Inklusif dan Transformasional

Pimpinan pesantren diharapkan dapat menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang mendorong perubahan, pembaruan, dan pemberdayaan seluruh elemen lembaga. Kepemimpinan seperti ini menuntut keterbukaan terhadap ide baru, kepekaan terhadap dinamika sosial internal, dan kemampuan membaca peluang eksternal. Selain itu, kepemimpinan yang inklusif juga membuka ruang partisipasi yang luas bagi guru, santri, staf, dan alumni dalam proses perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program. Pemimpin pesantren tidak hanya berperan sebagai manajer, tetapi juga sebagai inspirator, fasilitator, dan pengarah yang mampu menjaga nilai-nilai dasar sambil mendorong inovasi yang relevan.

## 10. Penguatan Jejaring Kemitraan dengan Pihak Eksternal

Pesantren perlu membangun dan memperluas jejaring kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pendidikan, keagamaan, pemerintah, maupun swasta. Kemitraan ini dapat berupa program pendampingan akademik, bantuan infrastruktur, pelatihan guru, penyediaan beasiswa, hingga pertukaran pengalaman dan sumber daya. Dengan kemitraan yang kuat, pesantren tidak harus menghadapi tantangan pendidikan secara mandiri, tetapi bisa berkolaborasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, keterlibatan lembaga luar juga dapat meningkatkan citra pesantren sebagai lembaga yang terbuka, progresif, dan relevan dalam pembangunan pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Abror, A. M., Anisrullah, & Dien, N. I. A. (2024). Transformasi dan inovasi untuk masa depan: Pesantren di era society. *Buletin Darunnajah*.

Anderson, A. (2006). *Implementasi kebijakan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Basit, A. (2019). *Manajemen Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan dalam perspektif Total Quality Management*.
- Basri, M. (2021). Pendidikan Islam dan tantangan modernitas: Perspektif kebijakan dan implementasi. *Journal of Islamic Educational Management*, 7(1), 45–60.
- Darlis, A. (2018). Analisis terhadap kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama dan keagamaan (melacak dampaknya terhadap pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, 25(2), 89–102.
- Firdaus Jeka, M. L., & Kurniawan, A. A. (2024). Total Quality Management Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*.
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). Analisis kebijakan pendidikan Islam Indonesia di era reformasi. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 9(1), 89–102.
- Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 serta implikasinya terhadap kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia. *Ambarsa: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 55–66.
- Ismail, I., Sumarmi, S., & Mahmud, M. E. (2023). Kebijakan pemerintah pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). *Damhil Education Journal*, 3(1), 44–50.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Peta jalan pendidikan Islam 2020–2045*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Rencana induk pengembangan pendidikan Islam*. Direktorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
- Ma'arif, S. (2014). *Manajemen pendidikan Islam di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Machali, I. (2015). Pendekatan integrasi-interkoneksi dalam kajian manajemen dan kebijakan pendidikan Islam. *El-Tarbawi*, 8(1), 32–53. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art3>
- Mahiddin, L. (2021). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Analisis kebijakan pendidikan
- Masnua, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 115–130.
- Nata, M. (2013). *Manajemen pendidikan Islam*. Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pesantren.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4i.

Rahman, D., & Akbar, A. R. (2021). Problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam sebagai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 76–89.

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

Samsinar, S., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran politik, kebijakan terhadap proses pelaksanaan dan penilaian pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 556–573.

Sholehah, K. M. (2023). Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, 3(1), 1–12.

Syafi'i, M. (2020). Reformasi pendidikan Islam: Pendekatan makro dan mikro. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 113–126.

Tilaar, H. A. R. (2004). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian strategis kebijakan pendidikan dalam era globalisasi*. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO. (2021). *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. UNESCO Publishing.

Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18–22.

Yana, H. H., & Susanti, L. (2024). Analisis kebijakan pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era globalisasi di madrasah. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–13.

Yayasan Darunnajah. (2023). *Profil lembaga dan struktur organisasi Darunnajah Jakarta*.